



## DIY Siapkan PSEL Berkapasitas 1.000 Ton per Hari

**YOGYA, TRIBUN** - Persoalan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pemerintah daerah menegaskan, penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat sebagai penghasil sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo mengatakan, persoalan sampah di DIY tak bisa dilepaskan dari keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang telah beroperasi sejak 1996. Selama hampir tiga dekade, kapasitas lahan tidak mengalami perluasan signifikan, sementara volume sampah terus meningkat.

"Maka pada 2023, bapak Gubernur DIY mengeluarkan surat edaran untuk desentralisasi pengelolaan sampah di kabupa-

ten/kota se-DIY. Ini yang menjadi arah kebijakan dari pemerintah daerah," kata dia.

Pemerintah kabupaten/kota telah melakukan desentralisasi, antara lain pembangunan dan operasional fasilitas pengolahan sampah, intervensi pengurangan sampah di masyarakat, penegakan hukum, penyusunan regulasi, hingga kolaborasi dengan swasta dan akademisi.

Dari sisi kinerja, desentralisasi mulai menunjukkan dampak terhadap penurunan volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Data DLHK DIY mencatat, volume sampah menurun menjadi sekitar 140 ton per hari dari sebelumnya hingga 262-265 ton per hari.

Meski demikian, Kusno menegaskan sisa sampah yang belum terkelola masih menjadi persoalan. "Nah itu semua masih menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian, masih menjadi PR bagi kami di peme-

rintah untuk menyelesaikan sisa sampah yang belum terkelola," ujarnya.

**Prioritas**

Problem sampah bukan hanya terjadi di DIY, melainkan merata di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terburukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Regulasi tersebut menempatkan Yogyakarta sebagai salah satu daerah prioritas pembangunan fasilitas Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Pembangunan PSEL DIY akan didanai melalui skema kolaborasi. Pendanaan infrastruktur berasal dari Danantara bersama Badan Usaha Pengembangan PSEL (BUPP), sementara biaya tipping fee ditanggung pemerintah pusat. Adapun pe-

merintah daerah berkewajiban menyediakan lahan serta menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari.

Pemerintah pusat, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pihak Danantara, telah melakukan verifikasi lapangan di lokasi calon proyek di sekitar TPA Piyungan. Sejumlah calon investor juga telah meninjau lokasi pada 2025.

Lahan PSEL disiapkan di Dusun Ngabalak, Kelurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, dengan luas sekitar 5,7 hektar dan berstatus milik Pemerintah DIY.

Kebutuhan infrastruktur pendukung seperti air baku akan dibagi bersama kabupaten/kota. Adapun pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, termasuk pelaksanaan kon-

sultasi publik.

Adapun untuk memenuhi target minimal 1.000 ton per hari, pembagian pasokan sampah dirancang dengan kontribusi dari masing-masing daerah, yakni Kota Yogyakarta sebesar 300 ton per hari, Kabupaten Bantul 250 ton per hari, dan Kabupaten Sleman 450 ton per hari.

Armada pengangkut juga telah disiapkan. Kota Yogyakarta, misalnya, memiliki 29 *dump truck*, 19 *compactor*, dan 5 *compact mini*, sementara Bantul dan Sleman juga memiliki armada serupa meski masih memerlukan tambahan.

Di tingkat nasional, penetapan lokasi PSEL Kartamantul telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di Yogyakarta bahkan masuk prioritas tahap awal dari empat lokasi pembangunan PSEL di Indonesia. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 28 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005